



**STRATEGI PEMERINTAH KOTA DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN
WISATA TERPADU (KWT): SEBUAH IMPLIKASI INTERVENSI KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN PARIWISATA**

Rini Zumaida¹, Hendri Koeswara^{1*}, Desna Aromatica¹

¹ Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Andalas, Padang, Indonesia

*hendrikoeswara@soc.unand.ac.id

Dikirim : 17/07/2022
Diterima : 23/09/2022
Terbit : 27/10/2022

Abstract

The research is a city government policy intervention in the form of a tourism development strategy in the Padang City Integrated Tourism Area. The strategic initiative carried out by the Government of the City of Padang by making a tourist destination an Integrated Tourism Area has changed the face of the City of Padang which is increasingly oriented towards becoming a tourist destination that can improve the economic welfare of the community. The necessity that is carried out by the Padang City Government is to design and develop a strategy to develop an Integrated Tourism Area (KWT). This study used a qualitative approach by elaborating primary and secondary data where the selection of informants was carried out purposively. The strategy used by the Municipal Government of Padang is through organizational strategy, program strategy, resource support strategy, and institutional strategy. The results of the study show that all of these strategies are carried out massively and show the relationship between policy interventions that effectively influence the governance of tourism development. And, this tourism policy intervention has implications for increasing the number of domestic and foreign tourists which also has implications for increasing local revenue (PAD).

Keywords: Policy Intervention, Tourism Development Strategy, Integrated Tourism Area.

PENDAHULUAN

Tren kunjungan wisata baik nasional maupun internasional yang terus meningkat telah mendorong berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia. Tak hanya itu, capaian sektor pariwisata telah mampu menjadi penyumbang devisa terbesar pada Tahun 2018 lalu. Dalam sektor ekonomi, pariwisata Indonesia juga berhasil melakukan branding yang menempati ranking 47 dunia sehingga pariwisata di Indonesia menjadi pilihan destinasi wisatawan mancanegara. Pengembangan capaian yang cukup stabil dalam sektor ini, sehingga mendorong pemerintah untuk menempatkan pariwisata sebagai sektor unggulan. Dan bagi pemerintah daerah, sektor pariwisata ini telah menunjang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pelbagai Kabupaten/Kota yang merupakan destinasi pariwisata terbesar di Sumatera Barat. Perbandingan PAD di beberapa kabupaten/kota dapat terlihat pada tabel

berikut:

Tabel 1. Perbandingan PAD Sektor Pariwisata Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun	Padang	Bukittinggi	Lima Puluh Kota
2017	Rp. 74.005.495.031	Rp. 37.053.422.401	Rp. 960.270.000
2018	Rp. 90.132.462.479	Rp. 37.421.007.115	Rp. 1.632.365.000
2019	Rp. 104.989.824.498	Rp. 38.091.536.042	Rp. 1.726.130.000
Jumlah	Rp. 269.127.782.008	Rp. 112.565.965.558	Rp. 4.318.765.000

Sumber : *Data Olahan Peneliti Tahun 2020*

Kontribusi industri pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi telah menjadi fokus perhatian yang kuat, utamanya pada daya saing domestik (Hong, 2008). Kajian yang dilakukan oleh Garcia, Rivero, Fernandez (2015) pada 144 negara juga menunjukkan terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi yang dialami di beberapa negara sebagai akibat dari perluasan kegiatan pariwisata. Pada Tabel 1 juga memperlihatkan kontribusi industri pariwisata terhadap PAD di beberapa kabupaten/kota tersebut di Sumatera Barat. Dan, Kota Padang mengalami peningkatan yang sangat *significant* dibidang pariwisata, hal tersebut juga ditandai dengan pengunjung Kota Padang yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan tentunya akan semakin berpengaruh terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.

Tabel 2 Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kota Padang Tahun 2014-2018

Tahun	Wisatawan Domestik	Wisatawan Mancanegara	Jumlah
2014	3.199.392	54.967	3.254.359
2015	3.298.454	57.318	3.355.772
2016	3.632.820	58.903	3.691.723
2017	4.368.375	67.286	4.435.661
2018	5.076.581	71.054	5.147.635

Sumber : *BPS Kota Padang Tahun 2019*

Jumlah kunjungan wisatawan baik domestik dan mancanegara terus meningkat setiap tahunnya. Tentunya pemerintah sangat berperan penting dalam pengembangan destinasi wisata yang ada di Kota Padang sehingga berdampak pada kenaikan angka kunjungan wisata tersebut.

Kajian penelitian sebelumnya sebagian besar mengabaikan pengaruh kebijakan dan tata kelola terhadap inovasi di bidang pariwisata (Pik Jemaat, Peters Bichler, 2019). Dan, lebih banyak kajian penelitian untuk menentukan efek tata kelola dan pengaturan tata kelola kolaboratif pada inovasi pariwisata. Sementara kajian yang mengaitkan antara kebijakan pariwisata dan strategi pemasaran juga telah dilakukan oleh Jumadi (2020). Akan tetapi, kebijakan dan tata kelola bidang pariwisata, dan intervensi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bentuk strategi belum ada kajian penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan.

Sedangkan kajian tentang strategi diluar kajian pariwisata juga sudah banyak dilakukan oleh ilmuwan lain seperti Damayanti, Nugroho, Triarda, Sari (2019) yang membahas strategi penanganan stunting. Atau kajian strategi pengembangan Taman Tematik seperti yang dilakukan oleh Tunnisah, Cadith, Ismanto (2021). Kajian tentang strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan juga telah dilakukan oleh Dewi, Diena Putri, Rakhman (2022). Sementara kajian tentang strategi pengembangan pariwisata juga telah banyak dilakukan oleh ilmuwan seperti Fernando, Rakhman (2021) tentang strategi pengembangan pariwisata ramah lingkungan. Atau kajian strategi tentang strategi pengembangan wisata pada destinasi prioritas rawan bencana yang dilakukan oleh Ady, Nur Rahmah, Sari, Rif'an (2020). Sementara itu Casimeira, Mahagangga (2016) mengkaji tentang strategi pengembangan pariwisata dengan pendekatan *analytical network process*. Sementara strategi pengembangan wisata kawasan pariwisata (2020) juga telah dilakukan oleh di Kawasan Borobudur. Sedangkan strategi pengembangan desa wisata juga telah dilakukan oleh Darmawan dkk (2021). Akan tetapi, kajian tentang strategi pengembangan wisata, utamanya tentang pengembangan Kawasan Wisata Terpadu di Kota Padang belum pernah terdapat kajian serupa. Sehingga penulis ingin mengisi kekosongan kajian peran pemerintah dalam kebijakan tata kelola pariwisata dan strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya, maka rumusan masalah yang digunakan adalah Bagaimana Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) oleh pemerintah daerah sebagai implikasi kebijakan tata Kelola pengembangan pariwisata di Kota Padang?

METODE PENELITIAN

Kajian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena sosial (Creswell, 2014). Kajian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Padang pada Tahun 2020-2022 dengan menggabungkan penggunaan data primer dan sekunder untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat terkait dengan strategi pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang pada Kawasan Wisata

Terpadu. Adapun untuk memperoleh data primer adalah melalui metode wawancara mendalam, yaitu teknik pengumpulan data untuk menggali lebih dalam informasi dari pelbagai informan yang terkait (Patton, 1990). Wawancara dilakukan dengan informan kunci yang dipilih dengan metode *purposive* sebagaimana yang dimaksud oleh Neuman (2003). Pemilihan informan kunci adalah yang benar-benar berperan atau memahami permasalahan utama terkait pengembangan Kawasan Wisata Terpadu di Kota Padang. Informan dalam penelitian ini antara lain Walikota Padang, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kota Padang, Kepala Bidang Destinasi, Usaha dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kota Padang, Kepala Bidang Program dan Perencanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kota Padang, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kota Padang, Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Kota Padang, Anggota TNI/Polri pada Danramil dan Polres Kota Padang, Anggota Kelompok Sadar Wisata Pantai Air Manis, dan Pengawas Lapangan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Padang.

Untuk mendapatkan data sekunder, terdapat 2 (dua) Langkah yang penulis lakukan. Pertama, Pertama adalah studi literatur, yaitu teknik pengumpulan data dengan memahami berbagai bahan bacaan seperti buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan karya para ahli yang relevan (Neuman, 2003; Patton, 1990). Kedua adalah studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji berbagai dokumen dan arsip yang berkaitan dengan objek kajian (Patton, 1990), antara lain peraturan, laporan, surat keputusan, arsip, pamphlet, baliho, dan dokumen lain yang terkait dengan pengembangan pariwisata pada Kawasan Wisata Terpadu. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Unit processing merupakan tahapan meninjau kembali semua data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan yang kemudian menghasilkan abstraksi dengan membuat ringkasan intinya dan menyempurnakan data tersebut (Neuman, 2003). Tahap selanjutnya adalah kategorisasi data. Kategori tersebut disusun berdasarkan kriteria, pemikiran, dan intuisi tertentu atas data yang diperoleh, yang kemudian ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian (Neuman, 2003). Langkah selanjutnya adalah memvalidasi data dengan menggunakan metode triangulasi. Sebagaimana dimaksud Moleong (2007), triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data; data hasil wawancara mendalam akan saling dikonfirmasi satu sama lain, baik antar informan maupun dengan berbagai kajian literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan terdapat hubungan antara kebijakan dengan tata

kelola pariwisata dengan melakukan analisis terhadap strategi pengembangan Kawasan Wisata Terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dengan menggunakan teori strategi yang dikemukakan oleh Kotten yang memiliki 4 (empat) dimensi strategi yaitu: Strategi Organisasi, Strategi Program, Strategi Dukungan Sumber Daya, dan Strategi Kelembagaan. Kebijakan Kota Padang dituangkan dalam Visi Kota Padang yang kemudian dirumuskan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019, yaitu mewujudkan Kota Padang sebagai kota pendidikan, perdagangan, pariwisata, yang sejahtera, religius, dan berbudaya. Terdapat orientasi pengembangan pariwisata di dalam visi Kota Padang tersebut, dan dengan visi itu Kota Padang menyatakan siap mendukung dan mensukseskan program *Wonderful* Indonesia dan mengembangkan potensi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru dunia. Program berskala Internasional akan dibuat oleh Pemerintah Kota Padang yang bertujuan untuk membuka kesempatan luas tidak hanya bagi para pelaku industri pariwisata, tapi juga pelaku ekonomi dalam negeri, mempromosikan berbagai destinasi dan keindahan yang dimiliki Kota Padang.

Berdasarkan visi tersebut, jelas bahwa Walikota Padang meletakkan pariwisata sebagai salah satu rencana program prioritas pemerintah dalam mewujudkan Kota Padang menjadi Kota Pariwisata tentunya dengan penyerahan tugas dan wewenang kepada Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis dalam program pemerintah daerah. Pengelolaan pariwisata Kota Padang telah difasilitasi secara serius oleh pemerintah Kota Padang melalui SKPD terkait yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tersebut inisiatif secara strategik telah dilakukan dengan membuat *event* tahunan yang menampilkan secara variatif pelbagai kegiatan untuk menarik kunjungan wisata sepanjang tahun. Terdapat 3 (tiga) pengembangan Pariwisata Kota Padang yang diunggulkan berdasarkan turunan dari RPJMD, yaitu: 1) Pembenahan Destinasi Wisata terpadu; 2) Pelestarian Budaya; dan 3) Peningkatan kemitraan dan Kerjasama dengan pelbagai pihak. Prioritas pengembangan pariwisata tersebut yang kemudian menjadi pedoman penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang 2014-2019 yang lalu. Dan, inilah yang menjadi fokus analisis dan temuan dalam kajian penelitian ini, Pemerintah Kota Padang pada periode tersebut berfokus kepada pengembangan, pembenahan serta revitalisasi untuk Kawasan Wisata Terpadu. Kawasan Wisata Terpadu adalah kawasan yang dibangun khusus untuk tujuan pariwisata, yaitu dengan memadukan bangunan dan pengelolaan daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan fasilitas ekonomi lainnya di dalam satu kawasan sebagai sebuah destinasi pariwisata. Kota Padang memiliki 5 (lima) destinasi yang berada di Kawasan Wisata Terpadu, maka objek wisata yang menjadi prioritas

untuk dilakukan pengembangan, yaitu: 1) Pantai Padang; 2) Revitalisasi Malin Kundang (Pantai Air Manis); 3) Gunung Padang; 4) Kota Tua; dan 5) Marina Batang Arau.

Pemerintah Kota Padang sangat serius dalam mengelola destinasi wisata unggulan Kota Padang, terbukti dengan adanya pembenahan yang dilakukan pemerintah terhadap destinasi wisata terkait, utamanya yang ada dalam Kawasan Wisata Terpadu. Pemerintah Kota Padang telah mempersiapkan, merencanakan, dan mengupayakan segala sesuatu dengan seksama, karena pemerintah memiliki peran yang sangat penting dan dominan (Judisseno, 2017). Sehingga strategi dalam pengembangan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang. Strategi menjadi suatu kerangka yang fundamental tempat suatu organisasi akan mampu menyatakan kontinuitasnya yang vital, sementara pada saat bersamaan ia akan memiliki kekuatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah-ubah. Strategi diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang yang akan diulas secara komprehensif berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh Kotten (dalam Salusu, 1996) sebagai berikut:

1. Strategi Organisasi

Strategi organisasi berkaitan dengan perumusan seperti misi, tujuan dan nilai-nilai serta inisiatif strategik yang baru, hal ini terlihat dalam misi dan tujuan organisasi. Strategi organisasi telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang khususnya Dinas terkait yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Disini Pemerintah Kota Padang telah melakukan strateginya berdasarkan misi dan tujuan yang dimilikinya. Inisiatif strategik terlihat sangat kentara dalam periodisasi kepemimpinan Walikota Mahyeldi dengan menjadikan Kawasan Wisata Terpadu menjadi prioritas dalam mengembangkan pariwisata di Kota Padang. Mewujudkan visi yang telah ditetapkan dan berupaya sebaik mungkin agar mewujudkan visi tersebut dengan melakukan strategi organisasi atau langkah-langkah agar dapat mencapainya dengan membuat pelbagai program dan kegiatan yang berhubungan dengan visi walikota tersebut. Sedangkan Organisasi Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang yang mempunyai peran dalam membantu walikota dalam mewujudkan visi tersebut. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang menargetkan mewujudkan Kota Padang sebagai destinasi wisata pesisir yang nyaman, indah dan berkesan dengan mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, mengembangkan potensi seni dan budaya, melestarikan sejarah dan peninggalan benda

cagar budaya serta membangun museum sebagai potensi pariwisata, dan mengembangkan promosi dan publikasi pariwisata dan kebudayaan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang juga telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Upaya revitalisasi dan melengkapi semua sarana prasarana yang dibutuhkan untuk kebutuhan objek wisata yang ada di Kota Padang secara masif dilakukan dengan mengalokasikan belanja dan investasi dari APBD Kota Padang untuk mewujudkannya. Dan, hal tersebut memang terlihat secara fisik terdapat perubahan wujud Kota Padang terutama di Kawasan Wisata Terpadu tersebut. Sebagaimana yang diungkap oleh Kotten dalam Salusu (1996) bahwa kejelasan visi merupakan komponen penting dalam strategi organisasi karena merupakan arah bagi organisasi. Pemerintah Kota Padang secara komprehensif telah melaksanakan dan mematuhi konsep strategi organisasi yang baik menurut Kotten dengan indikator terdapatnya kejelasan tujuan organisasi dalam mengembangkan Kawasan Wisata Terpadu (KWT). Dalam misi organisasi juga terlihat beberapa hal yang terkait dengan pencapaian visi, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif dan meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan. Mewujudkan pariwisata yang nyaman dan berkesan tersebut pemerintah memiliki cara agar membuat wisatawan tertarik untuk mengunjungi objek-objek wisata yang ada di Kota Padang. Dan, pemerintah Kota Padang telah berhasil dalam melakukan hal tersebut, dengan implementasi strategi dalam pengembangan wisata tersebut. Dan, tentunya hal tersebut juga berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi kota Padang. Pengorganisasian untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang untuk mewujudkan visi dan misi telah menjadikan pelaksanaan strategi yang jitu untuk mencapai visi tersebut. Apalagi di sisi lain Dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang merupakan mitra yang sangat kooperatif dalam pencapaian visi yang ada. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang ikut mengambil peran aktif dalam pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana fisik pada Kawasan Wisata Terpadu tersebut sehingga terdapat sinergi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang untuk visi Pemerintah Kota Padang secara keseluruhan

Sinergi dalam strategi organisasi yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait di Pemerintah Kota Padang semuanya bermuara pada visi mewujudkan 3 (tiga) aspek penting yaitu pendidikan, perdagangan, dan pariwisata yang saling terkait satu sama lain. Kesesuaian antara visi Pemerintah Kota Padang dengan ketepatan strategi yang

digunakan telah terdapat sesuai dengan pelbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan dari visi dan misi tersebut.

2. Strategi Program

Strategi program lebih memberikan perhatian kepada implikasi-implikasi strategi dari pilihan-pilihan program tertentu yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi. Seperti apa dampaknya apabila suatu program dilaksanakan dan khususnya lagi adalah bagaimana dampaknya bagi organisasi. Program dan kegiatan yang dilakukan pada dunia pariwisata merupakan suatu strategi yang menggambarkan perhatian pada suatu program tertentu yang bertujuan untuk pengembangan wisata (Wahyuni, 2020). Strategi Program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang tentunya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yang mempunyai tugas untuk kesuksesan pengelolaan di bidang pariwisata itu sendiri. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang memilih strategi program yang mempunyai dampak yang lebih baik yaitu kegiatan *event* tahunan dalam rangka mengembangkan destinasi wisata yang ada di Kota Padang. Utamanya adalah pengembangan destinasi wisata yang berada di Kawasan Wisata Terpadu, dengan melakukan revitalisasi dan pengembangan infrastruktur sehingga berdampak terhadap meningkatnya jumlah wisatawan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang itu sendiri. Terdapat banyak sekali *event* atau kegiatan yang dimiliki sebagai implikasi pengembangan strategi program Kawasan Wisata Terpadu yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang yaitu: 1) Festival Bakcang dan Lamang Baluo & Lomba Selaju Sampan Badunsanak yang berlokasi di Batang Arau Kota Tua; 2) Festival Kota Tua yang berlokasi di Kawasan Kota Tua; 3) Festival Siti Nurbaya yang berlokasi di Pantai Cimpago; 4) Pawai Telong-Telong yang berlokasi di Pantai Cimpago; 6) Jelajah Situs Cagar Budaya dan Kawasan Bersejarah yang berlokasi di Kawasan Kota Tua; dan 6) Gowes Siti Nurbaya yang berlokasi di Pantai Cimpago.

Kegiatan *event* tahunan tersebut sayangnya harus berhenti pada saat Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020. Padahal terdapat 8 (delapan) kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan pada saat Pandemi Covid-19 tersebut pada Tahun 2020, dan kondisi tersebut juga masih berlangsung pada Tahun 2021 dimana terdapat 3 (tiga) kegiatan yang sudah dianggarkan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang kembali tidak terlaksana. Padahal, sebelum terkendala Pandemi Covid-19 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang telah melaksanakan pelbagai program dan kegiatan yang

telah direncanakan, seperti melakukan kegiatan dan pelatihan untuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Padahal, Pokdarwis tersebut juga telah menjadi mitra dalam mengembangkan kegiatan wisata di objek, sehingga Covid-19 menjadi kehilangan momentum untuk menuai hasil kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Padahal kajian yang dilakukan oleh Dredge (2006) yang menyatakan pentingnya jejaring kebijakan dengan organisasi lokal penggiat pariwisata seperti Kelompok Sadar Wisata ini.

Pemerintah Kota Padang juga telah melakukan pengembangan infrastruktur pada masing-masing objek wisata yang terdapat di Kawasan Wisata Terpadu yang dilaksanakan secara bertahap sesuai perencanaan dan anggaran yang telah tersedia. Pantai Padang misalnya sebagai salah satu objek wisata yang termasuk dalam Kawasan Wisata Terpadu juga mendapatkan program perhatian yang luar biasa dari Pemerintah Kota Padang, tidak saja pengembangan infrastruktur tetapi penertiban dan penataan pedagang di Kawasan wisata pantai tersebut juga dilakukan sehingga pengunjung lebih nyaman dan aman saat berkunjung kesana. Dan, perubahan fisik pantai Padang sangat mengalami perubahan yang drastis pada saat itu dengan adanya strategi program dan kegiatan yang lebih tepat sehingga lebih menambah daya tarik objek wisata tersebut. Berdasarkan hasil identifikasi penulis, strategi program dan kegiatan yang melahirkan banyak sekali program dan kegiatan di Kota Padang telah berdampak terhadap segala aspek, baik itu bagi Pemerintah, Pedagang, maupun masyarakat lokal. Kegiatan perekonomian dan terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar Kawasan Pantai Padang telah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berjualan seperti makanan, minuman, baju, dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan revitalisasi yang dilakukan di Pantai Air Manis Padang, semakin menambah kesan dan ketertarikan pengunjung terhadap Batu Malin Kundang yang ada disana. Dampak program yang semakin membaik yang dilakukan dari turunan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota juga berimplikasi pada biro jasa perjalanan wisata. Program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan Kawasan Wisata Terpadu juga telah berdampak dengan meningkatnya wisatawan baik itu dari wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal, yang tentunya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang seperti tabel berikut ini:

Tabel 3 Data Kontribusi Kunjungan Wisatawan dan Nominal PAD Sektor Pariwisata dan PAD Kota Padang Tahun 2016-2018

Tahun	Kunjungan (Orang)			PAD (Rp)		% dari total PAD Kota Padang
	Domestik	Mancanegara	Jumlah	PAD Sektor Pariwisata	PAD Kota Padang	
2016	3.632.820	58.903	3.691.723	57.191.716.350	391.925.162.546	14,59 %
2017	4.368.375	67.286	4.435.661	74.005.495.031	454.295.916.658	16,29 %
2018	5.076.581	71.054	5.147.635	90.212.579.984	487.533.838.745	18,50 %
Jumlah	13.077.776	197.243	13.275.019	221.409.791.365	1.333.754.917.949	16,60 %

Sumber : *Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang Tahun 2019*

Berdasarkan tabel diatas peningkatan pengunjung wisatawan domestik dan mancanegara dan peningkatan PAD Sektor Pariwisata maupun PAD Kota Padang dari tahun ke tahun. Adapun % PAD Sektor Pariwisata dari total realisasi PAD Kota Padang pada Tahun 2016 sebanyak 14,59%, pada Tahun 2017 sebanyak 16,29% dan pada Tahun 2018 sebanyak 18,50%. Dapat dikatakan bahwa PAD dari sektor pariwisata memiliki kontribusi yang besar terhadap peningkatan PAD Kota Padang. Hal ini membuktikan bahwa pariwisata kota Padang memiliki pengembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun, baik dari segi kontribusi pengunjung maupun PAD Kota Padang dari sektor Pariwisata. Sehingga terdapat pengaruh kebijakan pengembangan pariwisata terhadap peningkatan pengunjung maupun realisasi PAD Kota Padang.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya

Strategi pendukung sumber daya ini memusatkan perhatian dengan memaksimalkan pemanfaatan dari sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Dengan memaksimalkan ketersediaan sumber daya manusia, keuangan/finansial, serta sarana dan prasarana tersebut akan dapat meningkatkan kinerja organisasi (Wahyuni, 2020). Strategi pendukung sumber daya ini merupakan semua fasilitas utama atau dasar yang memungkinkan suatu strategi organisasi berjalan dengan baik atau tidak, dimana strategi pendukung sumber daya ini merupakan suatu organisasi yang memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam sebuah instansi atau organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi. Menurut Kotten dalam Salusu (1996) strategi pendukung sumber daya ini bisa dilihat dari beberapa bagiannya yaitu, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber daya finansial.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset yang paling penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Dalam suatu organisasi, pegawai mempunyai potensi

apabila dikelola dengan baik dan benar, namun akan menjadi beban apabila salah kelola dan tidak diberikan pelatihan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang pada Tahun 2019 berjumlah 35 orang dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Tingkat pendidikan yang paling rendah yaitu SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) masih dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dengan jumlah 1 (satu) orang. Jumlah pegawai dengan latar Pendidikan SLTA terdapat sebanyak 8 (delapan) orang. Sedangkan tingkat pendidikan sarjana mendominasi SDM pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang yaitu sebanyak 65,7%, dimana untuk Strata Satu (S1) sebanyak 7 (tujuh) orang, Strata Dua (S2) sebanyak 15 (lima belas) orang, dan sudah memiliki latar belakang Pendidikan Strata Tiga (S3) sebanyak 1 (satu) orang. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang telah mengoptimalkan seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dalam upaya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk menjalankan tata kelola organisasi. Dan, SDM pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga telah diberikan peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis atau pelatihan yang telah dilakukan secara berkala. Artinya komposisi SDM walau tidak proporsional dari sisi kuantitas dan strata pendidikan serta latar belakang keilmuan pendidikan dicarikan solusi dengan peningkatan kapasitas SDM yang dimiliki dengan bimbingan teknis dan pelatihan.

Strategi pendukung sumber daya lainnya yaitu sarana prasarana juga telah disediakan oleh Pemerintah Kota Padang sebagai penunjang kepariwisataan dan dapat dipergunakan oleh wisatawan, pedagang ataupun masyarakat setempat. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang berupaya untuk memenuhi sarana dan prasarana di Kawasan Wisata Terpadu dengan pelbagai peralatan, perlengkapan kerja, serta fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Pemerintah Kota Padang menyadari pentingnya sarana dan prasarana yang tersedia yang merupakan komponen penting dalam pengembangan Kawasan Wisata Terpadu (KWT). Disamping itu segala sarana dan prasarana yang ada juga digunakan sebagai tempat pengembangan pariwisata yaitu dengan melakukan pemasaran dan promosi pariwisata, dan bentuk promosi yang dilakukan yaitu dengan promosi langsung dan promosi tidak langsung. Promosi langsung yang dilakukan adalah dengan mengadakan *event* pariwisata seperti adanya festival dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kalender tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Sedangkan promosi

tidak langsung yang dilakukan adalah dengan promosi melalui media cetak, seperti koran, majalah, kemudian dengan menggunakan website, media sosial, pakaian, merchandise, souvenir serta mengundang pers, influencer untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kawasan Wisata Terpadu. Akan tetapi belum ada upaya yang sungguh-sungguh menggunakan media sosial dan pemanfaatan internet dalam pemasaran dan promosi wisata Kota Padang. Akan tetapi secara konvensional cara promosi lain tetap dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui program dan kegiatan keliling Kota Padang khususnya di Kawasan Wisata Terpadu dengan Bus Pariwisata atau yang dinamakan Bus City Tour Raun-Raun yang para penumpangnya dibolehkan naik secara cuma-cuma (gratis). Fasilitas bus keliling gratis tersebut yang bermula dari LPC Menara dan titik akhirnya adalah di Masjid Raya Sumbar.

Berbeda dengan sumberdaya lainnya yang tak kalah penting dalam strategi pengembangan Kawasan Wisata Terpadu di Kota Padang, faktor finansial atau disebut juga kemampuan keuangan merupakan faktor yang juga krusial. Tanpa adanya anggaran yang mencukupi dan memadai maka suatu instansi atau organisasi akan sulit untuk berkembang. Faktor keuangan sangat menentukan kelanjutan suatu organisasi tersebut, walaupun di suatu organisasi tersebut memiliki sumber daya manusia yang handal, namun tanpa adanya anggaran yang memadai tentu akan tetap mengalami kesulitan. Hal ini termasuk juga dalam pengembangan Kawasan Wisata Terpadu di Kota Padang, jika tidak tersedia anggaran yang mencukupi maka strategi tidak akan berjalan dengan baik yang berimplikasi kepada tidak tercapainya visi organisasi. sumber daya finansial terkait program maupun kegiatan dan pembangunan infrastruktur di Kawasan Wisata Terpadu, sumber daya finansial diantaranya berasal dari APBN, APBD Kota dan APBD Provinsi, investor, CSR, dan pihak swasta lainnya yang berpotensi untuk membantu pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata yang ada di Kawasan Wisata Terpadu. Masih terdapat beberapa objek wisata yang jika dikembangkan memang masih membutuhkan bantuan dari investor atau pihak swasta lainnya.

Pemerintah Kota Padang juga memiliki keterbatasan untuk melakukan pengembangan pariwisata terkait sumber daya finansial, maka Pemerintah Kota Padang melakukan revitalisasi Kawasan Wisata Terpadu secara bertahap sesuai dengan anggaran yang telah tersedia untuk Tahun 2019 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang melakukan program dan kegiatan pariwisata untuk menunjang visi Walikota Padang seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Anggaran Program Pengembangan Pariwisata Kota Padang 2019

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Kerja 2019	
				Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	Program pengembangan destinasi pariwisata	Kota Padang	Meningkatnya Sarana prasarana di objek wisata	1.375.000.000	
2	Pemeliharaan rutin berkala bangunan objek wisata kota padang	Kota Padang	Terlaksananya pemeliharaan bangunan objek wisata kota padang	200.000.000	Pendapatan Daerah
3	Pembinaan usaha pariwisata kota padang dan pengelolaan objek wisata	Kota Padang	Terbinanya para pelaku usaha pariwisata kota padang	175.000.000	Pendapatan Daerah
4	Program Pengembangan kemitraan		Meningkatnya kemitraan antara stakeholders pariwisata	579.196.051	
5	Pengamanan terpadu objek wisata	Kota Padang	Terciptanya keamanan di objek wisata	579.196.051	Pendapatan Daerah

Sumber: Olahan Peneliti dari APBD Kota Padang 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Padang memang berfokus pada pengembangan Kawasan Wisata Terpadu dengan keberpihakan anggaran yang cukup besar untuk pengembangan destinasi wisata yang mencapai Rp 1.375.000.000,- Hal ini sangat membuktikan bahwa Pemerintah Kota Padang sangat serius untuk pengembangan potensi wisata yang ada di Kota Padang. Program untuk pengembangan destinasi pariwisata merupakan program yang paling banyak dianggarkan dana untuk Tahun Anggaran 2019 dibandingkan program lainnya pada tahun yang sama yang ada pada DIPA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Hal ini juga berimbas pada perbaikan fasilitas pariwisata sehingga objek pariwisata di Kota Padang nampak perubahan yang nyata pada fisik fasilitas sarana dan prasarana di tempat wisata. Sehingga objek wisata yang ada pada Kawasan Wisata Terpadu menjadi lebih menarik dan banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Hal ini juga membuktikan bahwa Kota Padang mempunyai peran yang sangat besar dalam membawa sektor pariwisata di Sumatera Barat untuk lebih berkembang dan lebih baik kedepannya.

4. Strategi Kelembagaan

Fokus dari strategi kelembagaan ini adalah mengembangkan kemampuan organisasi

dalam melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis. Dengan memperhatikan struktur, kewenangan, peraturan, dan standar operasional prosedur dalam suatu organisasi yang akan memudahkan organisasi dalam mengembangkan kemampuannya untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis tersebut. Pada dasarnya, strategi kelembagaan ini lebih kepada cara-cara dan upaya dari sebuah organisasi untuk memberdayakan dan mengembangkan organisasi, baik organisasi itu sendiri maupun individu-individu yang ada didalam suatu organisasi. Inisiatif strategik sesungguhnya dimulai dari Visi Walikota Mahyeldi untuk menjadikan Kota Padang sebagai destinasi wisata kelas dunia. Sehingga visi itulah yang diurai dalam strategi secara kelembagaan dengan terlebih dahulu mengeluarkan kebijakan terkait komitmen walikota dalam kebijakan terkait pengembangan pariwisata di Kota Padang. Seperti kajian yang dilakukan oleh Papadopoulou (2020) kebijakan pemerintah yang positif mempengaruhi industri pariwisata dan menarik lebih banyak pengunjung, pertumbuhan, dan daya saing. Sehingga dalam konteks ini strategi kelembagaan menjadi hal yang penting untuk meningkatkan daya saing domestik Pemerintah Kota Padang dalam industri pariwisata. Untuk menjalankan tugas dalam Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu tersebut diberikan wewenang kepada masing-masing bidang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Dan, bidang terkait tersebut adalah Bidang Destinasi Usaha dan Industri Pariwisata, Bidang Program dan Perencanaan, dan Bidang Pemasaran. Hasil identifikasi atas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang tersebut telah dijalankan sesuai program dan kegiatan atas arahan yang dilakukan oleh Kepala Dinas dalam pencapaian visi organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) telah menjadi pedoman bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam perumusan dan penyusunan rencana teknis. Dalam SOP perumusan dan penyusunan rencana teknik pengembangan kepariwisataan pelaksanaannya dimulai dari Kepala Bidang kepada Kepala Seksi dan kemudian diserahkan kepada JFU (Jabatan Fungsional Umum). Prosedur kerja yang dilakukan tentunya dilihat dari tugas pokok dan fungsi masing-masing.

PENUTUP

Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) oleh Pemerintah Kota Padang, merupakan upaya serius yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan daya saing domestik dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Strategi pengembangan wisata Kota

Padang dijalankan secara merata dan komprehensif melalui 4 (empat) strategi yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan oleh Pemerintah Kota Padang sehingga hasilnya cukup efektif. Kesuksesan dalam pengembangan Kawasan Wisata Terpadu di Kota Padang inilah yang menjadikan tercapainya Visi Kota Padang menjadi salah satu destinasi wisata dengan pengorganisasian seluruh aktivitas dengan memberdayakan sumber daya yang esensial. Upaya yang sangat signifikan terlihat dalam dalam strategi organisasi yang dijalankan yaitu melakukan revitalisasi dan pengembangan infrastruktur pada obyek wisata yang berdampak pada tingkat kunjungan wisata, yang merupakan misi dan tujuan organisasi. Aktivitas pariwisata yang ada di Kota Padang juga berimplikasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan signifikan mempengaruhi kenaikan PAD Kota Padang.

Sementara strategi program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang pada periodisasi Walikota Mahyeldi ini terlihat juga melakukan inisiatif-inisiatif strategik yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan, dampak mengadakan program dan kegiatan seperti event tahunan yang variatif untuk menarik kunjungan wisata secara rutin strategi tersebut sangatlah mumpuni. Kajian penelitian ini telah mengisi kekosongan penelitian yang menunjukkan terdapat pengaruh kebijakan dan tata kelola bidang pariwisata, dan intervensi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang seperti kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) ini sangat signifikan mempengaruhi peningkatan industri wisata di daerah ini. Dan, dalam kajian ini terdapat beberapa rekomendasi yang dapat penulis berikan diantaranya adalah konsistensi dan kontinuitas pengembangan wisata tetap harus dilakukan mengingat hal ini sekarang perubahan kepemimpinan membuat ritme untuk menjadikan Kota Padang menjadi daerah tujuan wisata kurang begitu kentara. Perlu dirumuskan kembali strategi yang lebih komprehensif bagi Pemerintah Kota Padang agar pencapaian visi untuk menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata sehingga daya saing domestik Kota Padang menjadi semakin kompetitif. Lalu, perlu kajian lanjutan untuk lebih mempertajam kontribusi penelitian yang menganalisis hubungan kebijakan dan tata kelola pariwisata, terutama dari aspek evaluasi kebijakan tata kelola pariwisata yang ada di Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

Ady, Ady et al. "Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Tanjung Lesung Sebagai Destinasi Prioritas yang Rawan Bencana". *Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia*, [S.l.], v. 2, n. 1, nov. 2019. ISSN 2655-965X.

- Casimeira, Azita Yeja; MAHAGANGGA, I Gst. Agung Oka. (2016). “strategi pengembangan pariwisata bumi sakti alam kerinci kabupaten kerinci, provinsi jambi (Suatu Pendekatan Analytical Network Process)”. *JURNAL DESTINASI PARIWISATA*, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 44 – 48.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publication: Thousand Oaks.
- Damayanti, R., Nugroho, A., Triarda, R., & Sari, I. (2021). “Peleburan ego sektoral: strategi menurunkan stunting di Trenggalek”. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 197-216. Retrieved from <http://jakp.fisip.unand.ac.id/index.php/jakp/article/view/189>.
- Darmawan, Hariadi Darmawan, , Daeng Nurjamal, Fiona Yonanda Putri, Huriyah Dzikriyatul Ainunnajah, Maulidina Ihza Almayda, Riki Subianto. (2021). “Strategi Pariwisata Terintegrasi Berbasis Sentralitas Spasial Pada Desa Wisata Di Kabupaten Sleman”, Vol 8 (2), pp 78-95.
- Destiningsih, Rian; Achsa, Andhatu; Verawati, Dian Marlina. Strategi Pengembangan Pariwisata di Wisata Balkondes Ngadiharjo di Kawasan Borobudur Kabupaten Magelang. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 322 – 328.
- Dewi, Susianty Natalia, Reiza Dienaputra, Cecep Ucu Rakhman. (2022). “Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Lambangjaya” *Barista: Jurnal Kajian Bahasa dan Pariwisata*, Vol 9(1), pp. 61-71, DOI: 10.34013/barista.v9i1.394.
- Dredge, D. “Policy Networks and the Local Organisation of Tourism,” *Tourism Management*, Vol. 27, No. 2, pp. 269-280. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2004.10.003>
- Fernando, W., & Rakhman, C. (2021). “Strategi Pengembangan Pariwisata Ramah Disabilitas di Teras Cikapundung”. *Jurnal kajian pariwisata dan bisnis perhotelan*, 2(2), 188-197. <https://doi.org/10.24036/jkpbp.v2i2.44572>.
- García, Pablo Juan Cárdenas-1, Rivero, Marcelino Sánchez, and Fernández, Juan Ignacio Pulido. (2015). “Does Tourism Growth Influence Economic Development?”. *Journal of Travel Research*, Vol. 54 (2), pp. 206–221.
- Hong, W.C., (2008). *Competitiveness in the Tourism Sector. Contributions to Economics*. Physica-Verlag Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-7908-2042-3_1.
- Judisseno, Rimsky K. (2017). *Aktivitas Dan Kompleksitas Kepariwisataaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jumadi, Jumadi. Membangun Loyalitas Wisatawan Melalui Kebijakan Pariwisata Hijau dan Strategi Pemasaran Pariwisata Hijau. *Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia*, [S.l.], v. 2, n. 2, dec. 2019. ISSN 2655-965X.
- Neumann, W.L., (2003). *Social Research Method*. London: Pearsons.
- Moleong, L. (2007). *Qualitative Research Method; revised edition*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patton. (1990). *Qualitative and Research Method*. California: SAGE Publication.
- Pikkemaat, B., Peters, M., Bichler, B.F. (2019). “Innovation research in tourism: Research streams and actions for the future”, *Journal of Hospitality and Tourism Management* Vol 41, pp. 184-196.
- Papadopoulou G. (2020). “Management Models of the Tourism Industry: The Case of Greece”. *Open Science Journal* 5(1), pp. 1-16.

- Salusu, J. (1996). *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Tunnisah, E., Cadith, J., & ., I. (2021). “Strategi pemerintah Kota Tangerang dalam pengembangan taman tematik di Kota Tangerang”. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 6 (2), 133-148. Retrieved from <http://jarp.fisip.unand.ac.id/index.php/jarp/article/view/220>.
- Wahyuni, Erien Sri. (2020). *Strategi Pemerintah Kota Padang Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Mitigasi Bencana*.